

PAY LESS TO SAVE PLANET: GREEN LOAN PARADOX DAN RESISTENSI UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN BERSUBSIDI

PAY LESS TO SAVE THE PLANET: THE GREEN LOAN PARADOX AND SME RESISTANCE TO SUSTAINABLE SUSTAINABLE FINANCING

Nining Sudiyarti^{1*}, Rosyidah Rachman², Usman³, Eko Sutrisno⁴
Universitas Samawa, Indonesia

***Email Correspondence:** niningsudiyarti04@gmail.com

Abstract

This study explores the paradoxical phenomenon where Small and Medium Enterprises (SMEs) in Sumbawa Regency resist subsidized green loan schemes despite their economic advantages. Using qualitative methods including in-depth interviews with 25 SME owners, focus group discussions, and document analysis, this research identifies key factors driving resistance: perceived complexity of application procedures, distrust toward financial institutions, concerns about sustainability requirements as operational burdens, limited environmental awareness, and preference for informal financing networks. The findings reveal a critical gap between policy design and grassroots implementation, where rational economic incentives fail to overcome institutional, cultural, and informational barriers.

Keywords: *Green loan paradox, SMEs Resistance, Sustainable Financing, Subsidized Credit, Environmental Finance.*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena paradoks dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa menolak skema pinjaman hijau bersubsidi meskipun memiliki keuntungan ekonomis. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 25 pemilik UMKM, diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci pendorong resistensi: persepsi kompleksitas prosedur pengajuan, ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan, kekhawatiran terhadap persyaratan keberlanjutan sebagai beban operasional, terbatasnya kesadaran lingkungan, dan preferensi terhadap jaringan pembiayaan informal.

Kata kunci: *Paradoks Pinjaman hijau, resistensi UMKM, pembiayaan berkelanjutan, kredit bersubsidi, keuangan lingkungan.*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi ancaman eksistensial yang mendorong transformasi fundamental dalam praktik bisnis global, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 menempatkan UMKM sebagai aktor krusial dalam pencapaian target tersebut. Sektor UMKM berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, namun di sisi lain juga bertanggung jawab atas porsi signifikan emisi karbon melalui praktik produksi yang belum efisien dan penggunaan energi tidak terbarukan. Transisi menuju praktik bisnis berkelanjutan bukan lagi pilihan melainkan keniscayaan, di mana instrumen pembiayaan hijau menjadi salah satu enabler utama dalam mendorong transformasi ini.

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan berbagai skema insentif pembiayaan berkelanjutan, termasuk green loan dengan subsidi bunga yang membuat biaya pinjaman 2-3% lebih rendah dibandingkan kredit konvensional. Skema ini dirancang dengan asumsi bahwa UMKM akan secara rasional merespons insentif ekonomi dengan mengadopsi pembiayaan yang lebih murah untuk investasi praktik berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan limbah. Teori ekonomi klasik memprediksi bahwa pelaku ekonomi rasional akan memilih alternatif dengan cost of capital terendah untuk memaksimalkan utilitas. Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan fenomena yang kontradiktif dengan prediksi teoretis tersebut.

Kabupaten Sumbawa, sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM cukup dinamis di Nusa Tenggara Barat, menghadapi paradoks yang menarik untuk diteliti. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa dari 15.847 unit UMKM yang beroperasi, hanya 8,3% yang mengakses pembiayaan formal, dan dari jumlah tersebut kurang dari 2% yang menggunakan green loan meskipun tersedia dengan bunga substansial lebih rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya resistensi yang tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh variabel ekonomi rasional. UMKM di Kabupaten Sumbawa justru lebih memilih kredit konvensional dengan bunga lebih tinggi atau bahkan pembiayaan informal dari rentenir dengan cost of capital mencapai 10-15% per bulan, dibandingkan green loan bersubsidi dengan bunga 6-8% per tahun. Paradoks ini menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi memainkan peran determinan dalam keputusan pembiayaan UMKM.

Literatur tentang *green finance* dan *sustainable entrepreneurship* telah mengidentifikasi berbagai hambatan adopsi praktik berkelanjutan pada UMKM, termasuk keterbatasan akses informasi, kapasitas manajerial terbatas, dan prioritas survival jangka pendek yang mendominasi orientasi strategis. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada konteks di mana *green finance* tidak menawarkan insentif *finansial* yang signifikan atau bahkan memiliki *premium cost*. Penelitian tentang resistensi UMKM terhadap *green loan* yang justru lebih murah masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Gap penelitian ini menjadi penting karena mengindikasikan bahwa solusi pembiayaan berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan insentif ekonomi, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas faktor *behavioral*, institusional, dan kontekstual yang mempengaruhi keputusan UMKM.

Resistensi UMKM terhadap *green loan* bersubsidi menimbulkan pertanyaan fundamental tentang efektivitas instrumen kebijakan berbasis insentif ekonomi dalam mendorong transformasi berkelanjutan. Jika asumsi rasionalitas ekonomi tidak terpenuhi dalam konteks ini, maka diperlukan pendekatan alternatif yang mengintegrasikan perspektif *behavioral economics*, *institutional theory*, dan *contextual factors*. Pemahaman tentang mekanisme resistensi ini menjadi krusial bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan stakeholder lain dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk akselerasi adopsi pembiayaan berkelanjutan pada UMKM. Tanpa pemahaman ini, investasi besar pemerintah

dalam subsidi green loan berisiko tidak mencapai target adopsi yang diharapkan dan gagal mendorong transformasi berkelanjutan pada level *grassroot*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena paradoks tersebut melalui lensa *behavioral finance theory*, *theory of planned behavior*, dan *institutional theory* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi UMKM di Kabupaten Sumbawa terhadap *green loan* bersubsidi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur tentang paradoks perilaku ekonomi dalam konteks *sustainable finance*, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi desain kebijakan dan intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan adopsi green loan pada UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyediakan kerangka konseptual untuk memahami determinan perilaku manusia melalui tiga konstruk utama: *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks adopsi *green loan*, *attitude* mengacu pada evaluasi positif atau negatif UMKM terhadap pembiayaan berkelanjutan, *subjective norm* mencerminkan persepsi tentang tekanan sosial untuk mengadopsi atau menolak *green loan*, sementara *perceived behavioral control* merepresentasikan persepsi UMKM tentang kemudahan atau kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan *green loan*. TPB telah banyak digunakan dalam penelitian *sustainable behavior* dan menunjukkan bahwa intensi tidak selalu linier dengan perilaku aktual, khususnya ketika terdapat hambatan struktural atau keterbatasan kontrol perilaku. Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa UMKM yang memiliki *attitude* positif terhadap keberlanjutan tetap resisten terhadap *green loan* karena *perceived behavioral control* yang rendah akibat kompleksitas prosedur atau keterbatasan kapasitas manajerial.

Behavioral Finance Theory memberikan perspektif tentang bagaimana faktor psikologis dan bias kognitif mempengaruhi keputusan finansial yang menyimpang dari prediksi teori ekonomi rasional. Konsep *bounded rationality* dari Simon (1957) mengakui bahwa pengambil keputusan memiliki keterbatasan kognitif dalam memproses informasi kompleks dan cenderung menggunakan heuristik untuk simplifikasi keputusan. Dalam konteks green loan, UMKM mungkin mengalami *information overload* dari persyaratan kompleks dan jangka waktu panjang untuk realisasi manfaat keberlanjutan, sehingga menggunakan *heuristic availability* dengan memilih opsi pembiayaan yang lebih familiar meskipun lebih mahal. Present bias, di mana individu memberikan bobot berlebihan pada konsekuensi jangka pendek dan mendiskon nilai masa depan, dapat menjelaskan mengapa UMKM mengabaikan penghematan bunga jangka panjang demi kemudahan akses jangka pendek dari pembiayaan informal. Status quo bias juga relevan di mana UMKM cenderung mempertahankan pola pembiayaan existing karena *switching cost psikologis* dan *effort* yang dipersepsikan tinggi untuk adopsi skema baru.

Institutional Theory menekankan bahwa perilaku organisasi tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi efisiensi ekonomi melainkan juga oleh tekanan institusional untuk *conformity*

terhadap norma, nilai, dan praktik yang dianggap *legitimate* dalam *field* organisasi. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme *isomorphism: coercive* (tekanan formal dari regulator), *mimetic* (imitasi terhadap organisasi sukses), dan *normative* (profesionalisasi dan diffusion norma). Dalam konteks UMKM di Kabupaten Sumbawa, lemahnya *coercive pressure* untuk adopsi praktik berkelanjutan, minimnya role model UMKM yang berhasil dengan *green loan* (*mimetic*), dan rendahnya professional network yang mendiffuse norma keberlanjutan dapat menjelaskan rendahnya legitimasi dan adopsi *green loan*. Institutional void, di mana *supporting institutions* seperti *business development services*, *technical assistance providers*, dan *intermediary organizations* masih lemah, menciptakan institutional distance yang membuat *green loan* tampak asing dan tidak *compatible* dengan konteks operasional UMKM.

Konsep *green loan* merujuk pada instrumen pembiayaan yang secara spesifik ditujukan untuk mendanai proyek atau aktivitas bisnis yang memberikan manfaat lingkungan seperti efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pencegahan polusi, pengurangan limbah, dan konservasi sumber daya. *Green Loan Principles* yang dikembangkan oleh *Loan Market Association* menetapkan empat komponen inti: penggunaan dana untuk *green projects*, proses evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana yang transparan, dan pelaporan penggunaan dana secara berkala. Dalam konteks Indonesia, OJK melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan mendorong penyaluran pembiayaan berkelanjutan dengan memberikan insentif *regulatory capital* relief dan subsidi bunga. Namun, implementasi *green loan* pada segmen UMKM menghadapi tantangan unik karena keterbatasan kapasitas UMKM dalam menyusun proposal proyek hijau, melakukan monitoring dampak lingkungan, dan menyediakan *reporting* yang memenuhi standar *green loan*.

Trade-off antara biaya jangka pendek dan manfaat jangka panjang menjadi dilema fundamental dalam keputusan investasi keberlanjutan UMKM. *Real Options Theory* menjelaskan bahwa dalam kondisi ketidakpastian tinggi, menunda investasi dan mempertahankan *flexibility* memiliki nilai ekonomi karena memberikan *option* untuk observasi perkembangan dan membuat keputusan lebih baik di masa depan. UMKM yang menghadapi volatilitas pasar tinggi dan *uncertainty* tentang regulasi lingkungan mungkin secara rasional menunda adopsi *green loan* untuk mempertahankan *option value*. *Cash flow constraint* yang dihadapi UMKM membuat mereka memprioritaskan alokasi sumber daya untuk kebutuhan operasional immediate daripada investasi keberlanjutan yang membutuhkan periode payback lebih panjang. *Myopic loss aversion*, di mana pelaku bisnis terlalu fokus pada potensi kerugian jangka pendek dan mengabaikan gains jangka panjang, dapat menjelaskan mengapa persyaratan *green loan* yang lebih kompleks dipersepsikan sebagai *cost* meskipun bunga lebih rendah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang resistensi UMKM terhadap pembiayaan hijau.

Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya mengeksplorasi fenomena kompleks yang melibatkan persepsi, sikap, dan pengalaman subjektif pelaku usaha.

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 20 pelaku UMKM yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria: telah mengetahui informasi tentang green loan, pernah mengakses pembiayaan formal dalam 3 tahun terakhir, dan bersedia untuk diwawancarai. Selain itu, penelitian juga melakukan wawancara dengan 5 *key informants* dari lembaga keuangan yang menawarkan green loan (bank komersial, BPR, dan koperasi) untuk memperoleh perspektif *supply side*. Wawancara dilakukan secara *face-to-face* dengan durasi 45-90 menit, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskripsikan verbatim untuk analisis.

Data kualitatif dianalisis menggunakan *thematic analysis* dengan pendekatan *inductive coding*. Transkrip wawancara dikoding secara *line-by-line* untuk mengidentifikasi *initial codes*, kemudian dilakukan *axial coding* untuk mengelompokkan codes yang memiliki keterkaitan konseptual menjadi sub-themes, dan akhirnya dilakukan *selective coding* untuk mengidentifikasi *main themes* yang merepresentasikan pola dominan dalam data. Proses coding dilakukan oleh dua *researcher* secara independen, kemudian hasil coding dibandingkan untuk menilai *inter-rater reliability* dengan nilai Cohen's Kappa 0,82 yang mengindikasikan *substantial agreement*. Software NVivo 14 digunakan untuk memfasilitasi proses organizing dan analyzing data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Green Loan: Subsidi Tinggi, Adopsi Rendah

Temuan utama penelitian ini mengidentifikasi paradoks signifikan dalam program *green loan*. Meskipun menawarkan suku bunga 3-5% lebih rendah (10-12% per tahun dibanding 13-17% untuk kredit konvensional), program ini mengalami resistensi tinggi. Analisis tematik mengidentifikasi lima faktor utama yang membentuk paradoks ini:

a. Kompleksitas Administratif dan Prosedural

Faktor dominan pertama adalah kompleksitas persyaratan administratif. Berbeda dengan kredit konvensional yang membutuhkan 5-8 dokumen standar, *green loan* memerlukan 12-15 dokumen tambahan, termasuk:

- 1) Rencana aksi lingkungan (*environmental action plan*)
- 2) Kajian dampak lingkungan sederhana
- 3) Komitmen pengurangan emisi karbon
- 4) Rencana pengelolaan limbah
- 5) Sertifikasi atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Seorang informan pelaku UMKM kerajinan kayu menyatakan: "*Saya tidak paham harus membuat dokumen apa. Diminta rencana pengurangan karbon, padahal saya tidak tahu berapa karbon yang dihasilkan usaha saya. Untuk kredit biasa, saya cukup bawa KTP, KK, dan surat usaha.*"

Kompleksitas ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas SDM UMKM. Hasil penelitian menunjukkan 76% UMKM tidak memiliki staf administrasi khusus, dan 84%

pemilik UMKM hanya berpendidikan maksimal SMA. Kondisi ini menciptakan hambatan signifikan dalam penyusunan dokumen teknis yang dipersyaratkan.

b. Kesenjangan Pemahaman Konsep Keberlanjutan

Analisis wawancara mengungkapkan kesenjangan pemahaman yang luas tentang konsep keberlanjutan. Mayoritas informan (88%) mengasosiasikan keberlanjutan dengan "tidak boleh menggunakan plastik" atau "harus pakai energi surya", yang dipersepsikan sebagai biaya tambahan yang mahal.

Hanya 12% informan yang memahami bahwa keberlanjutan dapat diwujudkan melalui praktik sederhana seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, atau penggunaan bahan baku lokal. Seorang pelaku UMKM pengolahan ikan menjelaskan: *"Saya pikir green itu harus pasang panel surya yang mahal. Ternyata setelah dijelaskan, mengolah limbah ikan jadi pupuk organik juga termasuk green. Tapi kenapa tidak dari awal dijelaskan begitu?"*

Temuan ini mengindikasikan kegagalan komunikasi dan edukasi dalam program *green loan*. Sosialisasi yang dilakukan lembaga keuangan cenderung berfokus pada aspek teknis pembiayaan, bukan pada isu substantif tentang praktik berkelanjutan yang aplikatif bagi UMKM.

c. Prioritas Kebutuhan Modal Jangka Pendek

Faktor ketiga adalah orientasi jangka pendek dalam kebutuhan modal. UMKM umumnya membutuhkan modal kerja untuk kebutuhan operasional segera seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, atau ekspansi kapasitas produksi jangka pendek. Sementara itu, investasi hijau seperti instalasi pengolahan limbah, peralatan hemat energi, atau sertifikasi lingkungan memerlukan waktu lebih lama untuk memberikan *return on investment*.

Seorang pelaku UMKM pertanian menyatakan: *"Saya butuh uang untuk beli pupuk dan benih sekarang. Kalau harus investasi di komposting atau irigasi hemat air, itu butuh waktu lama baru kelihatan hasilnya. Padahal saya harus bayar cicilan setiap bulan."*

Data menunjukkan 72% UMKM membutuhkan modal dengan periode pengembalian maksimal 6-12 bulan, sementara investasi hijau rata-rata memerlukan 18-36 bulan untuk mencapai titik impas (*break-even point*).

d. Asimetri Informasi dan Ketidakpercayaan

Temuan mengungkapkan tingkat asimetri informasi yang tinggi antara lembaga keuangan dan UMKM. Sebanyak 68% informan menyatakan tidak percaya bahwa suku bunga *green loan* benar-benar lebih rendah, dengan kekhawatiran adanya "biaya tersembunyi" atau "persyaratan berat di kemudian hari".

Ketidakpercayaan ini diperparah oleh pengalaman negatif masa lalu dengan program-program pemerintah yang tidak berkelanjutan. Seorang informan menjelaskan: *"Dulu ada program KUR dengan bunga murah, tapi prosesnya ribet dan lama. Setelah*

setahun program berhenti. Saya khawatir green loan juga begitu, sudah capek mengurus tapi programnya tidak berlanjut."

Dari sisi lembaga keuangan, terdapat kekhawatiran terhadap risiko kredit UMKM yang mengajukan *green loan*. Perwakilan bank menyatakan bahwa UMKM yang mengajukan pembiayaan hijau cenderung memiliki profil risiko lebih tinggi karena investasi pada aset yang belum terbukti memberikan nilai ekonomi langsung.

e. Keterbatasan Kapasitas Teknis dan Infrastruktur

Faktor terakhir adalah keterbatasan kapasitas teknis dan infrastruktur pendukung. Implementasi praktik berkelanjutan seringkali memerlukan teknologi, peralatan, atau infrastruktur yang tidak tersedia di Sumbawa atau memerlukan biaya pengadaan dan perawatan yang tinggi.

Contohnya, seorang pelaku UMKM pengolahan kopi yang tertarik menggunakan pengolahan limbah kulit kopi menjadi produk bernilai tambah menghadapi kendala tidak tersedianya mesin pengolah yang sesuai skala mikro dan terjangkau. Investasi minimal untuk mesin tersebut mencapai Rp 150 juta, jauh di atas kebutuhan dan kemampuan finansial UMKM mikro. Selain itu, 64% UMKM berlokasi di daerah dengan akses listrik terbatas atau tidak stabil, sehingga adopsi teknologi hemat energi atau *renewable energy* menjadi tidak praktis.

Perspektif Lembaga Keuangan: Dilema Antara Misi dan Bisnis

Wawancara dengan lembaga keuangan mengungkapkan dilema internal antara misi keberlanjutan dan viabilitas bisnis. Perwakilan bank komersial menyatakan bahwa *green loan* memerlukan biaya operasional lebih tinggi untuk verifikasi, monitoring, dan pelaporan keberlanjutan, sementara margin keuntungan lebih rendah akibat subsidi bunga

Seorang pejabat kredit menyampaikan: "*Untuk satu green loan, kami harus melakukan survei tambahan, koordinasi dengan konsultan lingkungan, dan pelaporan berkala ke OJK. Biaya operasional bisa 30-40% lebih tinggi dari kredit konvensional. Dengan margin yang sudah tipis, secara bisnis ini tidak menarik.*"

Data menunjukkan bahwa hanya 15% dari target penyaluran *green loan* lembaga keuangan tercapai pada tahun 2023, dan beberapa bank daerah mempertimbangkan untuk menghentikan program karena tidak cost-effective.

Tipologi Resistensi UMKM

Berdasarkan analisis mendalam, resistensi UMKM terhadap *green loan* dapat dikategorikan ke dalam empat tipologi:

- 1) Resistensi Informasional: UMKM yang tidak mengetahui keberadaan program atau salah memahami persyaratan dan manfaatnya (36%)
- 2) Resistensi Prosedural: UMKM yang mengetahui program tetapi tidak mampu atau tidak mau menghadapi kompleksitas administratif (32%)
- 3) Resistensi Ekonomi: UMKM yang mempertimbangkan manfaat finansial tidak sebanding

dengan biaya investasi hijau dan risiko yang dihadapi (24%)

- 4) Resistensi Filosofis: UMKM yang tidak percaya atau tidak memprioritaskan isu keberlanjutan lingkungan (8%)

Model Alternatif: Pembelajaran dari UMKM yang Berhasil

Meskipun tingkat adopsi rendah, penelitian ini mengidentifikasi tiga UMKM yang berhasil mendapatkan dan memanfaatkan *green loan* dengan baik. Analisis kasus sukses ini menghasilkan beberapa pembelajaran penting:

- a) Kasus 1: UMKM Pengolahan Rumput Laut UMKM ini berhasil mendapatkan *green loan* untuk instalasi pengolahan air limbah. Kunci keberhasilannya adalah pendampingan intensif dari NGO lokal yang membantu penyusunan dokumen dan rencana lingkungan. Investasi limbah terbukti mengurangi biaya operasional 15% per tahun melalui reuse air.
- b) Kasus 2: UMKM Kerajinan Tenun UMKM ini menggunakan *green loan* untuk mengganti pewarna sintetis dengan pewarna alami. Dengan pendampingan dari dinas perindustrian, mereka berhasil mendapatkan sertifikasi produk ramah lingkungan yang meningkatkan nilai jual 30% dan membuka akses pasar ekspor.
- c) Kasus 3: UMKM Pertanian Organik UMKM ini memanfaatkan pembiayaan hijau untuk sertifikasi organik dan sistem irigasi hemat air. Meskipun periode pengembalian investasi lebih lama (24 bulan), harga jual produk organik yang premium menghasilkan profitabilitas lebih tinggi jangka panjang.

Pola yang konsisten dari ketiga kasus adalah adanya pendampingan teknis eksternal yang membantu navigasi prosedur dan implementasi praktik berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap paradoks mendasar dalam program *green loan* bersubsidi untuk UMKM di Kabupaten Sumbawa, di mana insentif finansial substansial berupa suku bunga 3-5% lebih rendah dibandingkan kredit konvensional (10-12% vs 13-17%) gagal menghasilkan adopsi yang diharapkan. Dari 15.847 unit UMKM, hanya kurang dari 2% yang mengakses *green loan* meskipun tersedia subsidi bunga signifikan. Resistensi ini bukan semata-mata persoalan ekonomi rasional, melainkan fenomena multidimensional yang melibatkan lima faktor utama: kompleksitas administratif, kesenjangan pemahaman konsep keberlanjutan, prioritas modal jangka pendek, asimetri informasi beserta ketidakpercayaan, serta keterbatasan kapasitas teknis dan infrastruktur pendukung.

Kompleksitas prosedural menjadi hambatan dominan, dengan *green loan* menuntut 12-15 dokumen tambahan seperti rencana aksi lingkungan, kajian dampak karbon, dan komitmen pengurangan emisi—jauh lebih rumit dibandingkan 5-8 dokumen kredit konvensional. Sebanyak 76% UMKM tanpa staf administrasi khusus dan 84% pemilik berpendidikan maksimal SMA mengalami kesulitan ini, diperparah kesenjangan pemahaman di mana 88% informan mengasosiasikan keberlanjutan dengan investasi mahal seperti panel surya, bukan praktik sederhana seperti pengelolaan limbah lokal. Orientasi

jangka pendek UMKM, yang membutuhkan modal pengembalian 6-12 bulan, bertabrakan dengan periode break-even investasi hijau 18-36 bulan.

Asimetri informasi menciptakan ketidakpercayaan tinggi (68% informan), didasari pengalaman program pemerintah sebelumnya yang tidak berkelanjutan seperti KUR. Dari sisi lembaga keuangan, biaya operasional green loan 30-40% lebih tinggi akibat verifikasi dan pelaporan, dengan realisasi target hanya 15% pada 2023. Keterbatasan infrastruktur lokal, seperti akses listrik tidak stabil di 64% UMKM dan minimnya teknologi skala mikro (misalnya mesin pengolah limbah Rp150 juta), memperburuk situasi. Tipologi resistensi terbagi: informasional (36%), prosedural (32%), ekonomi (24%), dan filosofis (8%).

Paradoks ini mencerminkan kegagalan desain kebijakan yang mengasumsikan dominasi insentif finansial ala teori ekonomi klasik, mengabaikan behavioral finance (bounded rationality, present bias), Theory of Planned Behavior (perceived behavioral control rendah), dan institutional void. Kasus sukses tiga UMKM (pengolahan rumput laut, kerajinan tenun, pertanian organik) menunjukkan pendampingan eksternal sebagai kunci, menghasilkan penghematan 15-30% dan akses pasar premium. Temuan ini memperkaya literatur green paradox di negara berkembang, menekankan bahwa transformasi berkelanjutan memerlukan integrasi penyederhanaan prosedur diferensiatif, edukasi kontekstual dengan peer educator, ekosistem pendukung (NGO, insentif pajak, infrastruktur komunal), serta model hibrid pinjaman-hibah. Kapasitas, pengetahuan, dan legitimasi institusional berperan lebih krusial daripada subsidi semata untuk akselerasi adopsi grassroots.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyapong, D., & Attram, A. B. (2019). Effect of Owner-Manager's Financial Literacy on the Performance of SMEs in the Cape Coast Metropolis in Ghana. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 67-89.
- Bank Indonesia. (2023). *Profil UMKM Indonesia: Akses Keuangan dan Tantangan Pembiayaan*. Jakarta: Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia.
- Berrou, J. P., & Combarous, F. (2012). The Personal Networks of Entrepreneurs in an Informal African Urban Economy: Does the Strength of Ties Matter?. *Review of Social Economy*, 70(1), 1-30.
- Canepa, A., & Stoneman, P. (2008). Financial Constraints to Innovation in the UK: Evidence from CIS2 and CIS3. *Oxford Economic Papers*, 60(4), 711-730.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa. (2024). *Laporan Statistik UMKM dan Penyaluran Kredit Berkelanjutan Tahun 2022-2024*. Sumbawa Besar: Pemda Kabupaten Sumbawa.
- Doran, J., & Ryan, G. (2016). The Importance of the Diverse Drivers and Types of Environmental Innovation for Firm Performance. *Business Strategy and the Environment*, 25(2), 102-119.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.

- Meijer, L. J., Huijben, J. C., van Boxstael, A., & Romme, A. G. (2019). Barriers and Drivers for Technology Commercialization by SMEs in the Dutch Energy Sector. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 112, 114-126.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2021). *Green Loans: Principles and Guidelines for Sustainable Lending*. Geneva: UNEP FI.
- Widayati, I., & Arifin, Z. (2021). Financial Inclusion and SMEs Development in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 36(3), 245-262.
- World Bank. (2022). *Small and Medium Enterprises Finance: Global Trends and Local Challenges*. Washington DC: World Bank Group.
- Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Optimal Credit Guarantee Ratio for Small and Medium-sized Enterprises' Financing: Evidence from Asia. *Economic Analysis and Policy*, 62, 342-356
- Zhang, D., Zheng, W., & Ning, L. (2018). Does Innovation Facilitate Firm Survival? Evidence from Chinese High-tech Firms. *Economic Modelling*, 75, 458-468.